

Kedudukan harta kekayaan suami istri dalam hal terjadi keterlambatan pencatatan perjanjian perkawinan (analisis kasus penetapan nomor 52IPdt.P/2011/PN.Ska) = The position of spouses's assets in the event of tardiness in the registration of prenuptial agreement (case analysis court order number 52/PDT.P/2010/PN. Ska) / Margareth Mutiara Tri Jojor

Margareth Mutiara Tri Jojor, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20398225&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan harus dicatatkan dalam Akta Perkawinan. Namun, terdapat beberapa pihak yang terlambat mendaftarkannya. Skripsi ini membahas Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PN.Ska. yang dalam pertimbangannya tertulis bahwa kelalaian pendaftaran Perjanjian Perkawinan menyebabkan perkawinan antara Budi Santoso dan Lily Tjokrosusantodianggap tanpa adanya Perjanjian Perkawinan. Dengan metode deskriptif analitis, aturan mengenai Perjanjian Perkawinan ditinjau untuk mengetahui status kepemilikan harta bersama yang diperoleh sebelum Perjanjian Perkawinan dianggap berlaku berdasarkan Penetapan itu. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 139 – 179 KUH Perdata dan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan status kepemilikan harta bersama milik Budi dan Lily mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan pada Akta Perjanjian Perkawinan No. 1.

ABSTRACT

Prenuptial Agreement must be registered in the Deed of Marriage. However, there are several parties who are late to register it. This thesis discussed the Court Order Number 52/Pdt. P/2011/PN.Ska which in its judgment states that the negligence in registration led to the absence of the Prenuptial Agreement in the marriage between Budi Santoso and Lily Tjokrosusanto. With the descriptive research analytical methods, rules about Prenuptial Agreement is reviewed to find out the status of the possession of marital community of property acquired before the Prenuptial Agreement is considered valid upon the Court Order Number 52/Pdt. P/2011/PN.Ska. From this research, it can be concluded that Prenuptial Agreement is regulated in Article 139 up to Article 179 of the Civil Code and Article 29 Law Number 1 of 1974 and the status of marital community of property is based on the regulations instead of the Deed of Prenuptial Agreement Number 1.